DEMOKRASI

Nama: Antonius Oktavianus

Nim: 2111B0038

Email: fianaye20@gmail.com

Abstrak

Demokrasi adalah [bentuk pemerintahan](#) di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan [hukum](#). Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik [kebebasan politik](#) secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

A. Demokrasi Menurut Para Ahli

1. Abraham Lincoln

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

2. Charles Costello

Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.

3. John L. Esposito

Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

B. Sejarah

- 1 Kata "demokrasi" pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara-kota [Athena](#). Dipimpin oleh [Cleisthenes](#), warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 507-508 SM. Cleisthenes disebut sebagai "bapak [demokrasi Athena](#)."

Demokrasi Athena berbentuk [demokrasi langsung](#) dan memiliki dua ciri utama: [pemilihan acak](#) warga biasa untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan dan majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Semua warga negara yang memenuhi ketentuan boleh berbicara dan memberi suara di majelis, sehingga tercipta hukum

di negara-kota tersebut. Akan tetapi, kewarganegaraan Athena tidak mencakup [wanita](#), [budak](#), orang asing (*μέτοικοι metoikoi*), non-pemilik tanah, dan pria di bawah usia 20 tahun.

Dari sekitar 200.000 sampai 400.000 penduduk Athena, 30.000 sampai 60.000 di antaranya merupakan warga negara. Pengecualian sebagian besar penduduk dari kewarganegaraan sangat berkaitan dengan pemahaman tentang kewarganegaraan pada masa itu. Nyaris sepanjang zaman kuno, manfaat kewarganegaraan selalu terikat dengan kewajiban ikut serta dalam perang.

- 2 [Pemungutan suara kisanan](#) pertama dilakukan di [Sparta](#) pada 700 SM. [Apella](#) merupakan majelis rakyat yang diadakan sekali sebulan. Di Apella, penduduk Sparta memilih pemimpin dan melakukan pemungutan suara dengan cara pemungutan suara kisanan dan berteriak. Setiap warga negara pria berusia 30 tahun boleh ikut serta. [Aristoteles](#) menyebut hal ini "kekanak-kanakan", berbeda dengan pemakaian kotak suara batu layaknya warga Athena. Tetapi Sparta memakai cara ini karena kesederhanaannya dan mencegah pemungutan bias, pembelian suara, atau kecurangan yang mendominasi pemilihan-pemilihan demokratis pertama.
- 3 Meski [Republik Romawi](#) berkontribusi banyak terhadap berbagai aspek demokrasi, hanya sebagian kecil orang Romawi yang memiliki hak suara dalam pemilihan wakil rakyat. Suara kaum berkuasa ditambah-tambahi melalui sistem [gerrymandering](#), sehingga kebanyakan pejabat tinggi, termasuk anggota [Senat](#), berasal dari keluarga-keluarga kaya dan ningrat. Namun banyak pengecualian yang terjadi. □ Republik Romawi juga merupakan pemerintahan pertama di dunia Barat yang negara-bangsanya berbentuk Republik, meski demokrasinya tidak menonjol. Bangsa Romawi menciptakan konsep klasik dan karya-karya dari zaman Yunani kuno terus dilindungi. Selain itu, model pemerintahan Romawi menginspirasi para pemikir politik pada abad-abad selanjutnya dan negara-negara demokrasi perwakilan modern cenderung meniru model Romawi, bukan Yunani, karena Romawi adalah negara yang kekuasaan agungnya dipegang rakyat dan perwakilan terpilih yang telah memilih atau mencalonkan seorang pemimpin. Demokrasi perwakilan adalah bentuk demokrasi yang rakyatnya memilih perwakilan yang kemudian memberi suara terhadap sejumlah inisiatif kebijakan, berbeda dengan demokrasi langsung yang rakyatnya memberi suara terhadap inisiatif kebijakan secara langsung.

C. Bentuk-bentuk Demokrasi

1 Demokrasi langsung

Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan

sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena di mana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Di era modern sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara.

2 Demokrasi perwakilan

Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui [pemilihan umum](#) untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.

D. Jenis demokrasi berdasarkan prioritas

Jenis-jenis demokrasi berdasarkan yang dijadikan prioritas atau titik perhatian:

- Demokrasi Material
- Demokrasi Formal
- Demokrasi Campuran

E. Prinsip-prinsip demokrasi

Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam [konstitusi](#) Negara Kesatuan [Republik Indonesia](#). Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat [Almadudi](#) yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi". Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah..

- [Kedaulatan](#) rakyat
- Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
- Kekuasaan [mayoritas](#)
- Hak-hak [minoritas](#)
- [Jaminan](#) hak asasi manusia
- Pemilihan yang bebas, adil dan jujur
- Persamaan di depan [hukum](#)
- Proses hukum yang wajar
- Pembatasan pemerintah secara [konstitusional](#)
- [Pluralisme](#) sosial, [ekonomi](#), dan [politik](#)
- Nilai-nilai [toleransi](#), [pragmatisme](#), kerja sama, dan [mufakat](#).

F. Daftar pustaka

1. Gunawan Sumodiningrat & Ary Ginanjar Agustian, *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*, (Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama, 2008), hlm. 44.

2. As'ad Said Ali, 2010, Negara Pancasila Jalan Kemasalahatan Berbangsa, LP3ES, Jakarta,
3. Asshiddiqie, Jimly, 2007, Ideologi Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah konstitusi, Jakarta.
- 4.
5. Khaelan, 2004, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yoyakarta. Notonagoro, 1974, Pancasila Dasar
6. Falsafah Negara, Pancuran Tujuh , Jakarta.
- 7.
8. Salim, Emil, 1979, Sistem Ekonomi Pancasila, LP3ES, Jakarta.
- 9.
10. Wahyudi, Agus, 2006, Ideologi Pancasila: Doktrin yang Komprehensif atau Konsepsi Politik?
11. Dalam Irfan Nasution dan Ronny Agustinis (eds). Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik
12. Identitas dan Modernitas , FISIP UI, Depok, Jakarta